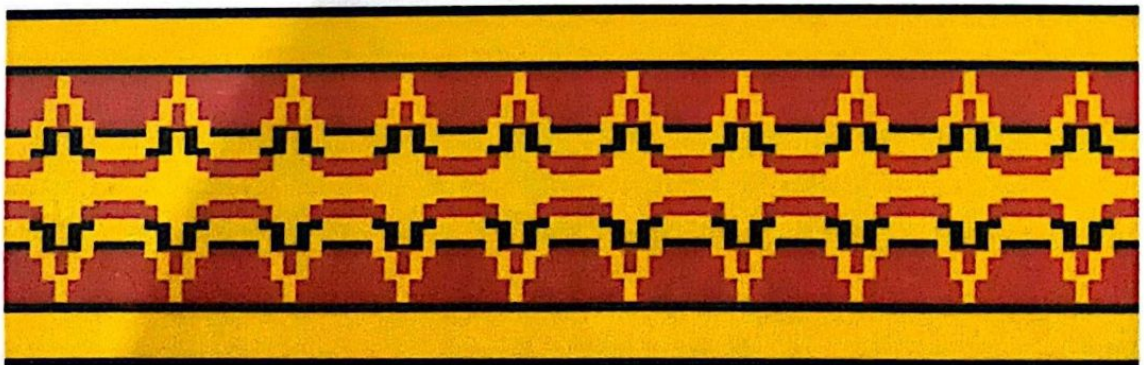




RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

I.1.a	Pengertian Ringkas Tentang Renja Perangkat Daerah	7
I.1.b	Proses Penyusunan Renja Perangkat	7
I.1.c	Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	8

I.2 LANDASAN HUKUM

PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG, PP, PERDA DAN KETENTUAN LAIN YANG MENGATUR

I.2.a	SOTK dan Kewenangan Perangkat Daerah	9
I.2.b	PEDOMAN YANG DIJADIKAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH.....	10

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

PENJELASAN TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN DARI PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

I.3.a	MAKSUD DAN TUJUAN.....	13
I.3.b	PEDOMAN YANG DIJADIKAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH.....	13

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

I.4.a	MENGURAIKAN POKOK BAHASAN DALAM PENULISAN RENJA PERANGKAT DAERAH SERTA SUSUNAN GARIS BESAR ISI DOKUMEN	14
-------	--	----

2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	
2.4.a	PROSES YANG DILAKSANAKAN.....	48
2.4.b	ALASAN PENTING REVIEW DILAKSANAKAN.	48
2.4.c	PENJELASAN TEMUAN-TEMUAN PROSES PERBANDINGAN DAN CATATAN PENTING.....	48
2.4.d	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL TAHUN 2023 (TABEL T-C.31)	49
2.5	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	
2.5.a	HASIL KAJIAN TERHADAP PROGRAM /KEGIATAN YANG DIUSULKAN	63
2.5.b	PENJELASAN BAGAIMANA PROSES USULAN PROGRAM/KEGIATAN DIUSULKAN OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN.	63
2.5.c	PENJELASAN KESESUAIAN USULAN DIKAITKAN DENGAN ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI.....	63
2.5.d	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 (TABEL T-C.32)	64
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	
3.1.a	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional terkait Tupoksi Dinas PMDT Provinsi Lampung	76
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
3.2.a	TUJUAN	103
3.2.b	SASARAN	103
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.3.a	Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	104
3.3.b	Garis Besar mengenai Rekapitulasi program dan kegiatan.	105
3.3.c	SIFAT PENYEBARAN LOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN	109
3.3.d	TOTAL KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF YANG DIRINCI BERDASARKAN SUMBER PENDANAANNYA	109

3.3.e	PENJELASAN JIKA RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DENGAN RANCANGAN AWAL RKPD, BAIK JENIS PROGRAM/KEGIATAN, PAGU INDIKATIF, MAUPUN KOMBINASI KEDUANYA.	110
3.3.f	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025. (Tabel T-C.33)	110

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMDT Provinsi Lampung	122
-----	---	-----

BAB V. PENUTUP

V.1	CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.....	132
V.2	KAIDAH - KAIDAH PELAKSANAAN.	132
V.3	RENCANA TINDAK LANJUT	133
V.4	TEMPAT, TANGGAL, NAMA PERANGKAT DAERAH, NAMA DAN TANDA TANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH, CAP STEMPEL	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1	T-C.29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2022 Prov.Lampung
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
Tabel 3	Perkembangan Alokasi dan Anggaran Dinas PMDT Provinsi Lampung sejak 2009-2023
Tabel 4	T-C.30 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PMDT Provinsi Lampung
Tabel 5	Kinerja Dinas PMDT berdasarkan RPJMD Prov. Lampung 2019-2024
Tabel 6	T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Tabel 7	T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Tabel 8	Tujuan dan Sasaran Dinas PMDT Provinsi Lampung
Tabel 9	T-C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
Tabel 10	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMDT Provinsi Lampung

peningkatan kapasitas SDM Calon Transmigran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan.

- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Sebagai penjabaran misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung mempunyai satu tujuan yaitu **Meningkatkan Desa Maju di Provinsi Lampung dan Meningkatkan kapasitas aparatur desa menggunakan smart village dan Meningkatkan desa maju di provinsi lampung** sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2020-2024 berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019.

3.2.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yaitu **Meningkatkan status desa tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan mandiri serta Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan**

smart village dan Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan mandiri.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas PMDT digambarkan sebagai berikut ;

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Dinas PMDT Provinsi Lampung.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
Meningkatkan kapasitas aparatur desa menggunakan smart village	Meningkatkan kapasitas aparatur desa menggunakan smart village	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan smart village	Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village
Meningkatkan desa maju di provinsi lampung	Meningkatkan status desa di provinsi lampung	Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan mandiri	Persentase penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan status desa mandiri

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah merealisasikan visi dan misi Gubernur lampung yang tertuang dalam 33 Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Dinas PMDT masuk pada Agenda Kerja ke-8 “SMART VILLAGE”

yaitu meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-partisipasi dan Agenda Kerja ke-9 "PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.

3.3.b. Garis Besar mengenai Rekapitulasi program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada tahapan Ranwal RKPD memiliki kegiatan yang sesuai dengan Renstra dan nomenklatur pada Permendagri Nomor 86 tahun 2016, Namun dikarenakan adanya perubahan Nomenklatur menjadi Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan penjabaran Kepmendagri 050-5889, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki **7 Program, 13 kegiatan serta 39 sub kegiatan**. Dengan persebaran lokasi kegiatan berada di 13 Kabupaten dengan sasaran desa. Selanjutnya total kebutuhan anggaran menurut sumber pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp.18.302.518.002,65**.

Program

Selanjutnya Mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2020-2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung mempunyai Program yaitu:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dituangkan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan acuan bagi terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Untuk menjalankan program tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, menjabarkan lebih lanjut program tersebut kedalam berbagai kegiatan meliputi :

1. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
5. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
7. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah
12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda

Sub Kegiatan

Berdasarkan Kegiatan diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki sub kegiatan meliputi :

1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
4. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
5. Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan, dan Bantuan Teknis
6. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
7. Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten Kota
8. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
10. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
11. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
12. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
13. Fasilitasi TIM Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
14. Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Transmigrasi
15. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
16. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman

17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
19. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
21. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
22. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
23. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD
24. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
25. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
26. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
28. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
29. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
30. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
31. Penyediaan Bahan Material
32. Fasilitasi Kunjungan Tamu
33. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
35. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
36. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
37. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
39. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

3.3.c. SIFAT PENYEBARAN LOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam hal penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, terbagi pada beberapa lokus berdasarkan sifatnya:

Untuk Kegiatan yang bersifat Rutin Urusan Penunjang Daerah dan Administrasi Perkantoran dilokasikan pada Dinas PMDT Provinsi Lampung, sedangkan untuk beberapa program Prioritas tersebar yaitu, Program Kerjasama Desa lokasi tersebar pada Desa pembina BUMDESMA, Administrasi Pembangunan Desa dengan lokasi tersebar pada 13 Kabupaten, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang tersebar pada 13 Kabupaten, serta Program Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan sebaran lokasi kawasan transmigrasi.

3.3.d TOTAL KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF YANG DIRINCI BERDASARKAN SUMBER PENDANAANNYA

Secara keseluruhan total kebutuhan dana/ pagu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp.18.302.518.002,65** dengan rincian sumber pendanaan sebagai berikut:

Gaji Rp.7.992.119.853,60 (Sumber Pendanaan DAU)

Program Kegiatan dan Rutin Rp.10.310.398.149,05 (Sumber Pendanaan APBD bersumber dari Pajak)

3.3.e PENJELASAN JIKA RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DENGAN RANCANGAN AWAL RKPD, BAIK JENIS PROGRAM/KEGIATAN, PAGU INDIKATIF, MAUPUN KOMBINASI KEDUANYA.

Rumusan Program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD pada Jenis Program/Kegiatan telah sesuai baik secara nomenklatur maupun indikator pada sub kegiatan berdasarkan Permendagri 19 tahun 2019. Namun dalam hal pagu indikatif masih terdapat perbedaan, hal tersebut dikarenakan kebutuhan anggaran yang berbeda pada masing-masing sub kegiatan setiap tahunnya didasarkan pada usulan kebutuhan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

3.3.f RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel TC-33 diuraikan pada tabel pada halaman berikut (terlampir)

Tabel 9.

T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun
Provinsi Lampung**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan Penting		Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatorif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikator
1	2	3	6	7		8-(7/6)	9		10- (5+7+9)	11-(10/4)
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama antar Desa 5 (lima) kerjasama	LAMPUNG	25	240,000,000.00	APBD			25	170,560,000.00
	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	LAMPUNG	5	240,000,000.00	APBD			5	170,560,000.00
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan	LAMPUNG	75	240,000,000.00	APBD			75	170,560,000.00

2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	LAMPUNG	25	3,047,789,500.00	APBD		25	2,442,316,900.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Masyarakat Desa, Sarana Prasarana Desa dan Usaha Ekonomi Desa serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	LAMPUNG	130	3,047,789,500.00	APBD		130	2,442,316,900.00
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	LAMPUNG	3	272,674,000.00	APBD		3	220,732,600.00

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	LAMPUNG	3	289,854,000.00	APBD	3	289,975,500.00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	LAMPUNG	3	251,333,500.00	APBD	3	170,560,000.00
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	LAMPUNG	2	824,289,000.00	APBD	2	500,000,000.00
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	LAMPUNG	15	209,639,000.00	APBD	15	61,048,800.00
Fasilitasi TIM Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	LAMPUNG	1	1,200,000,000.00	APBD	1	1,200,000,000.00

3	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	LAMPUNG	100	206,134,200.00	APBD		100	100,000,000.00
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang diselesaikan masalah lahannya	LAMPUNG	1	206,134,200.00	APBD		1	100,000,000.00
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	LAMPUNG	90	206,134,200.00	APBD		90	100,000,000.00
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi	LAMPUNG	100	208,060,000.00	APBD		100	175,000,000.00
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran keluar lampung	LAMPUNG	35	208,060,000.00	APBD		35	175,000,000.00

	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	LAMPUNG	50	208,060,000.00	APBD		50	175,000,000.00
5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi	LAMPUNG	100	200,194,530.00	APBD		100	125,000,000.00
	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan	LAMPUNG	1	200,194,530.00	APBD		1	125,000,000.00
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	LAMPUNG	35	200,194,530.00	APBD		35	125,000,000.00
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village	LAMPUNG	25	2,762,715,000.00	APBD		25	1,877,883,100.00
	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Desa yang didampingi pelaksanaan administrasinya menggunakan smart village	LAMPUNG	130	2,762,715,000.00	APBD		130	1,877,883,100.00

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	LAMPUNG	10	101,505,000.00	APBD		10	107,200,000.00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	LAMPUNG	130	320,556,000.00	APBD		130	354,000,000.00
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	LAMPUNG	300	101,505,000.00	APBD		300	0
Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan, dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	LAMPUNG	19	500,969,000.00	APBD		19	474,243,100.00
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	LAMPUNG	3	321,646,000.00	APBD		3	319,640,000.00
Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	LAMPUNG	126	1,416,534,000.00	APBD		126	622,800,000.00

7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	LAMPUNG	100	22,902,531,181.00	APBD	100	13,411,758,002.65
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	LAMPUNG	100	150,000,000.00	APBD	100	150,000,000.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	LAMPUNG	5	45,000,000.00	APBD	5	45,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAMPUNG	2	50,000,000.00	APBD	2	50,000,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAMPUNG	4	55,000,000.00	APBD	4	55,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan	LAMPUNG	100	16,894,942,161.00	APBD	100	10,042,619,853.60
	Persediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	LAMPUNG	12	8,404,199,853.60	APBD	12	7,992,119,853.60

Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	LAMPUNG	3	0	APBD	3	2,000,000,000.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	LAMPUNG	3	25,000,000.00	APBD	3	25,000,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	LAMPUNG	12	50,000,000.00	APBD	12	25,500,000.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi barang milik daerah	LAMPUNG	100	70,000,000.00	APBD	100	70,000,000.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	LAMPUNG	1	25,959,000.00	APBD	1	25,959,000.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	LAMPUNG	1	44,041,000.00	APBD	1	44,041,000.00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	LAMPUNG	0	-	APBD	0	-

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi kepegawaian	LAMPUNG	100	500,650,000.00	APBD		100	300,000,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	LAMPUNG	4	100,650,000.00	APBD		4	100,000,000.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	LAMPUNG	200	400,000,000.00	APBD		200	200,000,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi kepegawaian	LAMPUNG	100	4,414,654,620.00	APBD		100	1,813,1 * 3,800.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	LAMPUNG	22	44,495,600.00	APBD		22	44,495,600.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LAMPUNG	42	390,710,200.00	APBD		42	100,000,000.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	LAMPUNG	300	30,000,000.00	APBD		300	30,000,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	LAMPUNG	15000	25,000,000.00	APBD		15000	25,000,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	LAMPUNG	4896	18,720,000.00	APBD		4896	0
Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	LAMPUNG	2020	34,908,200.00	APBD		2020	34,908,200.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	LAMPUNG	36	160,000,000.00	APBD		36	100,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	LAMPUNG	112	3,560,720,620.00	APBD		112	1,146,835,000.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	LAMPUNG	5	150,100,000.00	APBD		5	331,875,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Persentase peningkatan kapasitas jasa penunjang urusan	LAMPUNG	100	407,056,400.00	APBD		100	661,524,349.05
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAMPUNG	100	146,056,400.00	APBD		100	126,484,349.05
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	LAMPUNG	100	261,000,000.00	APBD		100	535,040,000.00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Persentase peningkatan kapasitas pemeliharaan barang milik daerah	LAMPUNG	100	465,228,000.00	APBD		100	374,500,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	LAMPUNG	4	195,176,000.00	APBD		4	250,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LAMPUNG	35	24,500,000.00	APBD		35	24,500,000.00
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	LAMPUNG	46	245,552,000.00	APBD		46	100,000,000.00
JUMLAH				29,567,424,411.00				18,302,518,002.65

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung merupakan Dinas dengan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang memuat misi ke 2 dan ke-5 dari RPJMD Provinsi Lampung memiliki Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang digambarkan pada tabel berikut.

TABEL 10. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMDT Provinsi Lampung

MISI 5 “Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan”							
NO	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN dan SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA) Rp	Catatan Penting
1	2	3	4	6	7	8	
	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Menurunkan Status Desa Tertinggal dan Meningkatkan Status Desa Mandiri	A. Program Peningkatan Kerjasama Desa		Persentase Kerjasama antar Desa 5 (lima) kerjasama	170,560,000.00	
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	170,560,000.00	
				1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan	170,560,000.00	

				3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT, RW, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	289,975,500.00	
				4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	170,560,000.00	
				5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	500,000,000.00	
				6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	61,048,800.00	
				7	Fasilitasi TIM Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1,200,000,000.00	

		E.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi	125,000,000.00	
			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan				Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan	125,000,000.00	
				10	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman		Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	125,000,000.00	
MISI 2 "Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik "									
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Desa Menggunakan Sistem Smart Village	F	Program Administrasi Pemerintahan Desa				Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village	1,877,883,100.00	
			Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Jumlah Desa yang didampingi pelaksanaan administrasinya menggunakan smart village	1,877,883,100.00	
				11	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	107,200,000.00	
				12	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	354,000,000.00	

				13	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	0	
				14	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan, dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	474,243,100.00	
				15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	319,640,000.00	
				16	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	622,800,000.00	
			G.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	13,411,758,002.65	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	150,000,000.00	

				17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,000,000.00	
				18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000.00	
				19	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,000,000.00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase layanan administrasi keuangan	10,042,619,853.60	
				20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7,992,119,853.60	
				21	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,000,000,000.00	
				22	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25,000,000.00	
				23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	25,500,000.00	

				30	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,000,000.00	
				31	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30,000,000.00	
				32	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25,000,000.00	
				33	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	
				34	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	34,908,200.00	
				35	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas	100,000,000.00	
				36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1,146,835,000.00	
				37	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	331,875,000.00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Persentase peningkatan kapasitas jasa penunjang urusan	661,524,349.05	
				38	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	126,484,349.05	

BAB V PENUTUP

V.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Dinas PMDT. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

Selanjutnya Renja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan pada Dinas PMDT Provinsi Lampung. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

V.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Renja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang

tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

pelaksanaan

1. Sekretariat, bidang-bidang, subbagian, dan seluruh staf/aparatur Dinas PMDT Provinsi Lampung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;
 - b. menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan pelaksanaan triwulanan. dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap Renja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

V.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Lampung Tahun 2024 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2024.

Bandar Lampung, Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIRASI
PROVINSI LAMPUNG.**



Dr. ZAIDIRINA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19691011 199402 2 001